

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, ed. revisi Bandung, Refika Aditama, 2010.

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat, 2009.

Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin et.al, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya, CV. Elvaretta Buana, 2024.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2018.

Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Prod. Dr. Widodo,S.H., M.H., “*Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020.

M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, UNG Pres, 2015

Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram, Sanabil, 2022

Pande Putu Okta et.al, *Inovasi Kebijakan dan Evaluasi Insentif Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2023, Gramedia Pustaka Utama

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Perindo, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita, 2004.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2019

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

Buku Online

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, Kementerian Keuangan, 2025, diakses melalui https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-09/Buku%20Fasilitas%20Pajak%20Penghasilan%20Badan_di%20Indonesia.pdf pada 6 Mei 2026.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Daniel Belianto, Ning Rahayu “Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax Dan Implikasinya Bagi Indonesia”, *Indonesian Scientific Journal*, Universitas Indonesia, Vol. 9, No. 10, 2024.

Vita Apriliasari, “OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does it Promote Inter-Nation Equity”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Daniel Belianto dan Ning Rahayu, “Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya bagi Indonesia, *Syntax Literate: Indonesian Scientific Journal*, Vol. 9, No. 10, 2024.

Putri Jauharotul Wahidiyah dan Hermawan, “Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax Holiday di Indonesia”, *Jurnal Discretie*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Yolanda Oktarina, et.al., “Kontribusi Investasi Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”, *Menara Ilmu*, Vol. 18, No. 1, 2024.

Catherine Sumali, et.al, Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata, *Jurnal Bisnis Perspektif*, Vol.16, No 2, 2024.

Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” *Jurnal Hukum Tata Negara*, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Vol 4 No 2, 2021.

- Ridwan, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 22, 2003.
- Gina Marliana, “Peluang dan Aspek Hukum Investasi Asing dalam Bisnis Carbon Capture Storage di Indonesia” , Jurnal Riset Ilmiah, Univesitas Indonesia, Vol. 4, No. 9, 2025.
- Maya Rosmayanti dan Rani Apriani, “Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi”, Jurnal Panorama Hukum, Universitas Singaperbangsa, Vol 8 No 1, 2023.
- Saparilla Worokinasih et. al, “Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No 2, 2022
- Radja Triand Wijaya. S, Implementasi Destination-Based Taxation untuk Atasi BEPS dan Kerugian Fiskal melalui Pendekatan Yuridis Normatif-Komparatif, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 5, No 1, 2025.
- Anastasya Diannovita Sianturi et.al, Studi Literatur : Analisis Implementasi Dan Tantangan Penerapan Pilar 1 OECD Dalam Aspek Perpajakan Penghasilan Perusahaan Overthe-Top (Ott) Asing Di Indonesia, Jurnal Kreasi Ekonomi Nusantara, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Sinaga, I. G.et.al, Peran Global Minimum Tax dalam Mengatasi Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional di Indonesia, Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, Vol 3, No 4, 2025

- Harahap et.al, Analisis Dampak Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Konteks Perpajakan, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Vol 1, No 2, 2024
- Wijaya, S., & Utamawati, H. Pajak Penghasilan Dari Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol 3 No (2), 2018 Nasution, H. H., & Lubis, N. N. R, Penerapan Pph Pasal 26 Terhadap Transaksi Internasional: Studi Atas Efektivitas Pemotongan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis, Vol 19, No 3, 2025.
- Rafsanjani, N., & Ardiansyah, B. G., Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perusahaan Asing Dalam Perspektif Perpajakan Internasional, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 3, No 1, 2021.
- Yanto, Suyono, E., & Magfiroh, S. Mitigating international double taxation: A study of Indonesian tax law. Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology, Vol 44, No 5, 2023
- Amelia Cahyadini et.al, Tax Strategy as an Alternative to Tax Incentives to Stimulate Investment in the Global Minimum Tax Era in Indonesia, Law 14, Universitas Padjajaran, 2025
- Aribowo Irwan, Menarik Investasi Ke Indonesia dengan Tax Holiday, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 2, No 2, 2021
- Allaire U. Karzon, Tax Expenditures and Tax Reform, 38 Vanderbilt Law Review 1397,1985

- Beamish, P. W. & Chakravarty, D, “Using The Resource-Based View In Multinational Enterprise Research”, *Journal of Management*, Vol 47, No 7, 2021.
- Luo, Y, Paradigm Shift And Theoretical Implications For The Era Of Global Disorder, *Journal of International Business Studies*, Vol, 55, No 1, 2024
- George, G., & Schillebeeckx, S. J. D., Digital Transformation, Sustainability, And Purpose In The Multinational Enterprise. *Journal of World Business*, Vol 57 No 3, 2022.
- Patala, S., et.al., Multinational Energy Utilities In The Energy Transition: A Configurational Study Of The Drivers Of FDI In Renewables. *Journal of International Business Studies*, Vol 52, No 5, 2021
- Savitri, I. K, Pengaruh Foreign Direct Investment Pada Kebijakan Net Zero Emission dan Pengembangan Listrik Terbarukan di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 4 No 10, 2025.
- Rachman, S. N. et.al, Analisis hukum terhadap aturan hukum penanaman modal asing dalam mendorong investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6, No 4, 2025.
- Bangun, M. H, *Joint venture agreement yang komprehensif sebagai sarana perlindungan hukum dalam kegiatan foreign direct investment (FDI) di Indonesia*, *Media Hukum Indonesia*, Vol 3, No 4, 2025
- Hartono, A, Harmonisasi hukum nasional dalam perjanjian investasi langsung asing dan tantangan investasi internasional. *CAUSA, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 13, No 2, 2025.

- Mahmud, M. T. E, Prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam dan implikasinya terhadap kewenangan negara dalam mengatur investasi langsung asing. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3, No 3, 2025.
- Iyan Nasriyan, Asas Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10, No 02, 2019
- Agus Iskandar, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indoensia, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 11, No 2, 2021
- Herman, H. Perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1 No 2, 2015
- Asyiah, N. Eksistensi perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 1, 2016
- Nasarudin, T. M. Asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 7, No 2, 2016
- Haris, O. K. Good governance dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. *Yuridika*, Vol 30 No 3, 2015
- Sari, I., & Susanto, A, Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemerintahan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 15, No 1, 2025.
- Gazali, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mualamat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Bahrina Almas, Keadilan Redistribusi Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No 1, 2019

Moeljono et al, Perspektif Ajaran Islam dalam Praktek Penghindaran Pajak, AMAL Journal Islamic Economic and Businnes Vol 5, No 1

Daryanti et.al, Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam, Akmen Jurnal Ilmiah, Vol 21, No 1, 2024.

Iwandi, Kedudukan Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam: Studi Perbandingan dengan Sistem Konvensional, Al-Hasyimiyah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 1, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: “*Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Agreement on the Pillar One and Pillar Two Blueprints*”, 2020.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Internet

Faisal Ismail, “Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3 Februari 2025, diakses melalui <https://opini.kemenkeu.go.id/pages/read/penerapan-pajak-minimum-global-di-indonesia-urgensi-dan-gambaran-umum> pada 12 Desember 2025.

IBFD, “Base Erosion and Profit Shifting - BEPS”, IBFD, 28 April 2025, diakses melalui <https://us.ibfd.org/knowledge-hub/tax-insights/base-erosion-and-profit-shifting-beps> pada 12 Desember 2025.

OECD, “Base erosion and profit shifting (BEPS)”, Organisation for Economic Co-operation and Development, diakses melalui <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html> pada 12 Desember 2025.

Zubin Patel, “OECD Pillar Two - Global Minimum Tax Taking action: managing your compliance obligations”, Deloitte, diakses melalui <https://www.deloitte.com/an/en/services/tax/perspectives/oecd-pillar-two.html> pada 12 Desember 2025.

Bart Van Droogenbroek dan Fernando Longares, “Potential transfer pricing implications of the upcoming MiCA Regulation for crypto-asset service providers”, EY, 23 Desember 2021, diakses melalui https://www.ey.com/en_lu/insights/tax/oecd-releases-model-rules-on-the-pillar-two-global-minimum-tax pada 13 Desember 2025.

OECD, “The Pillar Two Rules in a Nutshell”, Organisation for Economic Co-operation and Development, hlm 1 diakses melalui <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf> pada 12 Desember 2025.

Annisa Diah Hapsari, “Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia”, Direktorat Jenderal Pajak, 25 April 2024, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia> pada 13 Desember 2025.

Ortax, “Adopsi Pajak Minimum Global, Pemerintah Terbitkan PMK 136 Tahun 2024”, 17 Januari 2025, diakses melalui <https://ortax.org/adopsi-pajak-minimum-global-pemerintah-terbitkan-pmk-136-tahun-2024> pada 13 Desember 2025.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Insentif, diakses melalui <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/insentif> pada 28 Januari 2026.

Joyce Yedija, “Apa itu Tax Holiday dan Bagaimana Implementasinya di Indonesia?”, Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers), 25 November 2025, diakses melalui <https://dntlawyers.com/apa-itu-tax-holiday-dan-bagaimana-implementasinya-di-indonesia/> pada 14 Desember 2025.

Dewa Suartama, “Mengenal Jenis-Jenis Tax Holiday di Indonesia”, Ortax, 15 Januari 2023, diakses melalui <https://ortax.org/pahami-pengaturan-tax-holiday-sesuai-pasal-31a-uu-pph> pada 14 Desember 2025.

Muchamad Irham Fathoni, “Pajak Minimum Global: Peluang Penerimaan, Tantangan Kepatuhan”, Direktorat Jenderal Pajak, 21 Oktober 2025, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-minimum-global-peluang-penerimaan-tantangan-kepatuhan> pada 14 Desember 2025.

Win Partners, “Pajak Minim Global Solusi Efektif untuk Memerangi Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional”, diakses melalui <https://winpartners.id/blog/pajak-minimum-global-solusi-efektif-untuk->

[memerangi-penghindaran-pajak-perusahaan-multinasional/](#) pada 14 Desember 2025.

Lambang Wiji Imantoro, “Untung Rugi Penerapan Global Minimum Tax”, Pratama Indomitra, 4 Februari 2025, diakses melalui <https://pratamaindomitra.co.id/untung-rugi-penerapan-global-minimum-tax-gmt> pada 14 Desember 2025.

Ortax, “Bagaimana Dampak Pilar 2 Terhadap Insentif Pajak di Indonesia?”, Ortax, 31 Oktober 2023, diakses melalui <https://ortax.org/bagaimana-dampak-pilar-2-terhadap-insentif-pajak-di-indonesia> pada 14 Desember 2025.

Marianus Defriandik Bahu, “Peran Investasi Asing Langsung dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, Kompasiana, 25 Maret 2024, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/andiksdefry7276/6600d9ec147093122e493aa2/peran-investasi-asing-lansung-dalam-pembangunan-ekonomi-di-i> pada 14 Desember 2025.

Maisya Sabhira, “Navigasi Ketidakpastian Investasi Menghadapi GMT di Indonesia”, Pajak.com, diakses melalui <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/navigasi-ketidakpastian-investasi-menghadapi-gmt-di-indonesia/> pada 14 Desember 2025.

Rama Ames Remonda, “PMK 136/2024: Liminalitas Insentif Pajak”, MUC Consulting, 3 September 2025, diakses melalui <https://muc.co.id/id/article/pmk-1362024-liminalitas-insentif-pajak> pada 14 Desember 2025.

ASEAN Briefing, Why Singapore?, 2016, diakses melalui <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/why-singapore> pada 22 Mei 2026.

Andrew Galway, “Singapore brings Refundable Investment Credits regime into force”, Sovereign, 1 Desember 2025 diakses melalui <https://www.sovereigngroup.com/news/singapore-brings-refundable-investment-credits-regime-into-force> pada 28 Januari 2026.

Martha Trisan Ulibasa Pangaribuan, “Tax Holiday vs. Top-up Tax: Merancang Ulang Insentif Pajak Indonesia di Era Pajak Minimum Global, 5 November 2025, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/tax-holiday-vs-top-tax-merancang-ulang-insentif-pajak-indonesia-di-era-pajak-minimum-global> pada 28 Januari 2026

OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”, OECD Publishing, Paris, 2021 hlm 8 diakses pada https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_782bac33-en.html pada 11 Januari 2026.

Zidni Hudan Said Purnomo, Direktorat Jenderal Pajak, 24 Januari 2024, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-kebijakan-tax-holiday-dan-tax-allowance> pada 19 Januari 2026.

Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum”,terdapat dalam <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 17 Desember 2025.

OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, Hlm 66 diakses melalui https://www.oecd.org/en/publications/2015/10/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_g1g58cdd.html pada 17 Februari 2026.

OECD 2015, Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris hlm 15 diakses melalui https://www.oecd.org/en/publications/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report_9789264241343-en.html pada 14 Februari 2026.

Anaïs Verreckt, The Legal Status Of Globe Model Rules And The Administrative Guidance, hlm 6 diakses melalui <https://shop.lindeverlag.at/buch/the-global-minimum-tax-selected-issues-on-pillar-two-20109/e/leseprobe/E100573.pdf> pada 3 Maret 2026.

OECD Pillars In Association With Orbitax, Implementasi Pillar Two, 2022 diakses melalui <https://oecdpillars.com/pillar-tab/pillar-two-implementation/> pada 17 Mei 2026.

Adeline Hilary Tambunan, Apa itu Tax Treaty?, Pajakku, DJP, 19 Mei 2023, diakses melalui <https://artikel.pajakku.com/apa-itu-tax-treaty>, pada 3 Maret 2026. Lihat juga dalam Pasal 4 - 15 UU Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional.

Tax Prime, Indonesia Resmi Menerapkan Pajak Minimum Global, hlm 2 diakses melalui <https://www.taxprime.net/wp-content/uploads/2023/03/Indonesia-Resmi-Menerapkan-Pajak-Minimum-Global-TaxPrime-Newsletter.pdf> pada 17 Februari 2026.

Muhammad Akbar Aditama, Perhitungan Effective Tax Rate dan Penentuan Top-UP Tax dalam kerangka Pajak Minimum Global (GloBE), Pratama Intitute For Fiscal Policy & Governmence Studies, 10 Februari 2026 diakses melalui <https://pratamainstitute.com/penghitungan-effective-tax-rate-dan-penentuan-top-up-tax-dalam-kerangka-pajak-minimum-global-globe> pada 25 Februari 2026

Sutiah Sidik & Dewi Mita R, Mengenal Perhitungan Covered Tax Sesuai PMK 136/2024, MUC Consulting, 2025 diakses melalui <https://muc.co.id/id/article/mengenal-perhitungan-covered-tax-sesuai-pmk-1362024> pada 14 Mei 2026.

Galuh Nora C.A, Poin-Poin Utama dalam Perhitungan Laba/Rugi GloBE, DDTCNews, 2025 diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/1812765/poin-poin-utama-dalam-penghitungan-labarugi-globe>, pada 16 Mei 2026.

- Febiola Anglica Puspa, Asas Sumber dan Asas Domisili dalam Pemungutan Pajak Indonesia, Fiscal's Lab, Research and Literature, Kostaf FIA UI, Vol 21, 2023. Diakses melalui <https://www.kostaffiaui.com/fiscals-lab/vol.23-%7C-asas-sumber-dan-asas-domisili-dalam-pemungutan-perpajakan-indonesia> pada 20 Maret 2026.
- Martin Sihombing, Kamus Ekonomi: Apa Arti Insentif Fiskal, Bisnis.com, 23 Agustus 2013, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130823/9/158344/kamus-ekonomi-apa-arti-insentif-fiskal> pada 3 Maret 2026.
- Fortune Indonesia, Indonesia Berikan Insentif Pajak Hingga 30% untuk Riset Semikonduktor Maret 2026, diakses melalui <https://www.fortuneidn.com/business/indonesia-beri-insentif-pajak-hingga-30-untuk-riset-semikonduktor-00-6cmtl-gyzg7z> pada 9 Maret 2026.
- Pajakku, Daftar Insentif Pajak untuk Dorong Pertumbuhan Industri Di Kuartal IV 2025, Desember 2026, diakses melalui <https://artikel.pajakku.com/daftar-insentif-pajak-untuk-dorong-pertumbuhan-industri-di-kuartal-iv2025> pada 9 Maret 2026.
- Ni Luh Putu Karlina Dewi, "Mengenal Tax Expenditure; Belanja Perpajakan yang Menguntungkan Wajib Pajak, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-tax-expenditure-belanja-perpajakan-yang-menguntungkan-wajib-pajak> pada 7 Maret 2026.

OECD 2010, Tax Expenditure in OECD Countries, 2010, hlm 14 diakses melalui https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/01/tax-expenditures-in-oecd-countries_glgfbcaf/9789264076907-en.pdf diakses pada 7 Maret 2026.

Direktorat Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal, Tax Expenditure : Strategi Pemerintah untuk Memajukan Perekonomian, diakses melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2018/11/15/172253709336730-tax-expenditure-strategi-pemerintah-untuk-memajukan-perekonomian> pada 7 Maret 2026.

Susilo Endri, Tax Holiday: Mempercanti Iklim Investasi, Memperkuat Industri, Opini Kemenkeu, 2024 diakses melalui <https://opini.kemenkeu.go.id/pages/read/tax-holiday-mempercantik-iklim-investasi-memperkuat-industri> pada 16 Mei 2026.

Clausing, K. A., Saez, E., & Zucman, G, Ending Corporate Tax Avoidance And Tax Competition: A Plan To Collect The Tax Deficit Of Multinationals, SSRN Electronic Journal, diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3655850 pada 10 Mei 2026.